



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, konteks, jenis, dan langkah kebijakan)

Dukha Yunitasari^{1*)}, Ida Bagus Putu Arnyana², Nyoman Dantes²

¹Universitas Hamzanwadi, Indonesia

²Universiyas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 03rd, 2023

Revised Jul 09th, 2023

Accepted JAUG 13th, 2023

Keyword:

Implementasi kebijakan,
Pendidikan dasar,
Paradigma kebijakan

ABSTRACT

Artikel ditulis dengan tujuan menganalisis secara analitik hal-hal terkait implementasi kebijakan pendidikan dasar, terkait dengan definisi, pelaksana, konteks, jenis, dan langkahnya. Sebagai kajian literatur, artikel ini ditulis dengan metode *research policy*, dengan teknik analisis konten. Disimpulkan bahwa: a) kebijakan pendidikan dasar di Indonesia termasuk kebijakan publik dan menjadi otoritas pemerintah pada berbagai level. b) terjadi ambigu dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar sebagai kebijakan publik, yang cenderung sebagai kebijakan kesejahteraan sosial. c) efektivitas implementasi kebijakan publik bidang pendidikan dasar ditentukan oleh aspek-aspek konseptual-metodologis, paradigma dan pola relasi pemerintah-masyarakat, yang cenderung diabaikan oleh pengampu kebijakan pada berbagai level



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Dukha Yunitasari
Universitas Hamzanwadi
Email: dukha.yunitasari@gmail.com

Pendahuluan

Tiga proposisi penting mengawali artikel ini, yakni pemahaman kebijakan menyangkut pengertian, paradigma kebijakan dalam dinamika sosial, dan implementasi kebijakan sebagai realitas relasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga proposisi terkait kebijakan, hampir ketiganya dikaitkan dengan proses analisis, sehingga lazim kata kebijakan sekaligus dipahami sebagai analisis kebijakan. Karena itu, kata implementasi kebijakan sebagaimana judul artikel ini sesungguhnya terkait dengan analisis kebijakan dalam konteks dimaksud, yakni pendidikan dasar dengan seluruh komponen yang melingkupinya. Melalui pemahaman, paradigma, dan implementasi kebijakan mengantarkan pemahaman tentang definisi, pelaku dan pelaksana, arena, jenis dan langkah kebijakan pendidikan dasar. Dalam beberapa hal, artikel ini akan dilengkapi dengan informasi kontekstual implementasi kebijakan pendidikan dasar sebagai referensi induktif yang menguatkan artikel ini. Mengacu pandangan kelompok Harvard dan Berkeley di Indonesia sebagaimana diacu oleh teoretikus dalam beberapa literatur, seperti Tilaar dan (Suryadi and Tilaar 1993); (Muhadjir 2004); (David 2006); (Nugroho 2008) hingga (Dwiyanto 2011) selalu mengaitkan analisis dan implementasi kebijakan dengan tingkat perkembangan masyarakat di suatu negara, bidang-bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan konteks implementasi kebijakan itu sendiri, termasuk pendidikan dasar.

Sejak era perang dunia II, lembaga-lembaga dunia, seperti UN dan biro-biro internasionalnya, seperti IMF, WHO, World Bank, dan lainnya cenderung mengelompokkan negara berdasarkan tingkat ekonomi, menjadi negara ekonomi maju (negara maju), ekonomi menengah (negara berkembang), dan ekonomi rendah (negara

misikin) (Jalal and Supriadi 2001) (Suyanto and Hisyam 2006). Ketiga kelompok negara ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan dasar menyangkut apa yang dipahami sebagai kebijakan, paradigma kebijakan, dan implementasi kebijakan. Dalam hal bidang kehidupan, analisis dan implementasi kebijakan selalu membutuhkan kehadiran ilmu-ilmu khusus yang terkait dengannya, sebagai sudut pandang atau basis keilmuan analisis dan implementasi kebijakan. Melalui basis keilmuan tertentu, dikenal analisis dan implementasi kebijakan sebagai bidang interdisipliner. Melalui interdisipliner inilah dikenal adanya kebijakan makro dan mikro dalam berbagai bentuk analisis dan implementasi kebijakan. Kebijakan makro berupaya menganalisis kebijakan dengan memperhatikan bidang-bidang lain yang terkait di dalamnya. Misalnya, pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dan lingkungan hidup, pendidikan dan religiositas masyarakat, dan seterusnya. Secara mikro, analisis dan implementasi kebijakan hanya memotret fenomena kebijakan dengan bidang itu sendiri secara terbatas. Misal, analisis dan implementasi pendidikan dasar hanya mengaitkan kebijakan dengan hal-hal terkait langsung, seperti guru, sekolah, kurikulum, anggaran, orang tua, dinas terkait, dan lainnya, yang seluruhnya adalah bidang dalam pengelolaan pendidikan dasar. Pemahaman tentang kelompok negara, kebijakan sebagai bidang interdisipliner, dan analisis makro-mikro dalam analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar akan memperjelas pemahaman tentang definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar sebagaimana maksud artikel ini. Berdasarkan pemahaman melalui pengertian, paradigma, dan realitas relasi dalam analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar, tujuan penulisan artikel ini diklasifikasi menjadi lima, yakni dirumuskannya: a) definisi analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar; b) diklasifikasinya aktor analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar; c) teridentifikasinya arena analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar; d) dikelompokkannya jenis analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar; dan e) terurainya langkah analisis dan implementasi kebijakan pendidikan dasar. Selain mereferensi pada proposisi tentang pemahaman, paradigma, dan realitas relasi, aspek-aspek status dalam kelompok negara, analisis hubungan makro-mikro menjadi referensi dalam merumuskan kelima tujuan artikel ini. Karena itu, setelah abstrak dan pendahuluan, tulisan diurut dalam literatur review, metode, temuan, diskusi, dan simpulan, dan selanjutnya referensi.

Metode

Kajian menggunakan metode *Research Policy* oleh John Collier (Muhadjir 2004). Metode *Research Policy* dimaksudkan untuk: 1) memperjelas pemahaman atas pengertian definisi, aktor, arena, jenis, dan langkah implementasi kebijakan pendidikan dasar bagi pengampu kebijakan pendidikan dasar; 2) mendorong pengampu kebijakan pendidikan dasar dan peneliti melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan pengertian yang komprehensif, kejelasan aktor dan arena, jenis dan langkah implementasi kebijakan pendidikan dasar. Data kualitatif berbentuk konteks implementasi kebijakan pendidikan dasar dihimpun melalui studi literatur, selanjutnya analisis konten berdasarkan sumber primer (artikel), dan sumber sekunder (literatur ilmiah populer/buku monograf (Denzin and Lincoln 2010).

Menurut Denzin & Lincoln (2010), studi literatur terdiri dari beberapa tahap yaitu 1) Memilih topik atau isu penelitian yang relevan; 2) Menentukan tujuan penelitian literatur; 3) Membuat kerangka konseptual; 4) Menentukan batasan studi literatur; 5) Menentukan sumber literatur; 6) Mengumpulkan data literatur; 7) Membaca dan mengevaluasi literatur; 8) Menganalisis dan menyintesis literatur; 9) Mengidentifikasi kesenjangan Penelitian; 10) Menulis laporan studi literatur. Adapaun langkah-langkah tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Studi Literatur

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dalam Pemahaman (Referensi Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)

Kebijakan pendidikan dasar sebagaimana maksud artikel ini dipahami melalui dua pandangan, yakni kebijakan dalam konteks analisis kebijakan dan analisis kebijakan publik. Dunn (Suryadi and Tilaar 1993) (Arwildayanto, Arifin, and Warni 2018; Romadhon, Marini, and Sumantri 2021; Safitri, Marsidin, and Subandi 2020; Suhartono 2021) menguraikan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu prosedur dalam menghasilkan informasi masalah-masalah kemasyarakatan berikut tindakan pemecahannya. Pemahaman tersebut berorientasi pada tiga konteks selanjutnya, yakni perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya, perumusan kebijakan baru yang berbeda sama sekali dengan kebijakan sebelumnya, atau perbaikan secara total atas kebijakan sebelumnya, tetapi masih mengadopsi sebagian kecil kebijakan sebelumnya. Terkait analisis kebijakan publik, Thomas R. Dye (Nugroho 2008) menguraikan, kebijakan publik sebagai proses analisis kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membangun kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis kebijakan publik yang dilakukan pemerintah terkait dengan alasan mengapa suatu kebijakan dilaksanakan, hasil yang dicapai, kekurangan dan kelemahan, hingga rekomendasi perbaikan kebijakannya. Pemahaman analisis kebijakan dan analisis kebijakan publik sebatas sejajar dalam hal proses, prosedur, dan hasil yang dicapai. Hanya saja pada pemahaman analisis kebijakan publik tampak adanya otoritas pemerintah sebagai pengampu kebijakan atas kebutuhan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tampak siapa pelaku/aktor, jenis, dan langkah kebijakannya. Tentu saja pengampu kebijakan menjadi dominasi pemerintah, sehingga pemerintah disebut sebagai *endowment policy*. Tentu saja posisi dominan ini akan berpengaruh pada jenis kebijakan yang dilakukan diukur dan ditentukan sesuai indikator pemerintah. Demikian pula langkah dan prosedurnya menjadi ranah pemerintah. Dalam konteks demikian, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pemerintah, dan tidak dapat menentukan alternatif dalam pengambilan akses kebijakan. Pandangan kebijakan sebagai analisis kebijakan dan kebijakan publik mengandungi pemahaman konseptual dan metodologis. Secara konseptual, pengampu kebijakan perlu menerjemahkan, menafsirkan, dan mendefinisikan apa saja yang menjadi ranah kebijakannya, termasuk di dalamnya menentukan ukuran-ukuran ketercapaian dan efektivitas kuantitatif. Secara metodologis, mengingat kebijakan dan kebijakan publik merupakan sejumlah proses dan prosedur dalam memperoleh informasi yang menjadi dasar kebijakan maka kebijakan akan berurusan dengan hal-hal yang bersifat metodologis dan teknis. Kebutuhan metodologis dan teknis menjadikan kebijakan memenuhi syarat ilmiah dan akademis.

Implementasi kebijakan dasar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konteks analisis kebijakan dan kebijakan publik karena pendidikan dasar menyangkut khazanah publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar sudah jelas menjadi ranah kebijakan mikro karena secara langsung dikaitkan dengan salah satu jenis dan tingkat pendidikan, yakni pendidikan dasar. Sebagai analisis kebijakan mikro, implementasi kebijakan dasar terkait dengan sistem pendidikan dan pembelajaran, seperti kebijakan kurikulum, pengembangan kapasitas guru, konteks pembelajaran, sarana pendukung pembelajaran, penilaian, hingga atmosfer pembelajaran. Intinya terkait dengan keseluruhan sistem pendidikan dan pembelajaran sebagaimana diatur dalam delapan standar nasional pendidikan (Primasari, Marini, and Sumantri 2021). (Primasari et al. 2021) dalam kajian tentang kebijakan pendidikan dasar khususnya model penilaian. Dengan mengacu PP No. 23/2016, Dian Primasari, dkk menyimpulkan cakupan penilaian pendidikan dasar mengacu pada tiga kompetensi sebagaimana dirumuskan Benjamin S. Bloom, yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kajian lain yang lebih luas, tapi masih terkait kebijakan dalam konteks mikro dilakukan oleh (Carl et al. 2023) tentang literasi bidang fisika pada beberapa negara di Eropa. Walaupun tidak secara langsung menyebut kebijakan pendidikan dasar, kajian ini menarik sebagai referensi karena simpulan yang diperoleh menyebutkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan suatu kompetensi hingga tingkat tertentu harus menjadi perhatian semua pihak secara terus menerus. Alasan yang menarik adalah pendidikan dan pembelajaran merupakan agenda yang kompleks dan jangka panjang. Kajian lain yang masih bersifat umum dilakukan oleh (Khaikleng, Wongwanich, and Sujiva 2014) dalam analisis kebijakan reformasi pendidikan di Thailand. (Khaikleng et al. 2014) menggunakan tiga pendekatan, yakni model deduktif, induktif, dan mental. Model deduktif dimanfaatkan dalam upaya menganalisis kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Model induktif dimanfaatkan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah pada masyarakat sasaran kebijakan. Sedangkan model mental digunakan dalam memantau dinamika dukungan mitra kerja dalam membantu kebijakan pemerintah. Satu simpulan yang dikemukakan adalah, kualitas guru dalam jangka panjang akan berpengaruh positif pada kualitas peserta didik. Karena itu, kebijakan peningkatan kualitas guru strategis dalam reformasi pendidikan di Thailand. *Review* beberapa sumber di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan dan kebijakan publik, termasuk pendidikan dasar merupakan keseluruhan prosedur dan proses analisis atas kebijakan pemerintah atas kebutuhan masyarakat dalam rangka perbaikan kebijakan, perumusan kebijakan baru, hingga pergantian kebijakan.

Kebijakan dalam Paradigma (Referensi Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)

Tradisi analisis dan implementasi kebijakan di Indonesia mengenal empat paradigma kebijakan, yakni kebijakan untuk kesejahteraan sosial, kebijakan untuk publik, kebijakan sosial, dan kebijakan otonomi/desentralisasi. (Sa'ud 2006) menjelaskan, kebijakan untuk kesejahteraan sosial dirancang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks daerah atau negara. Kebijakan untuk kesejahteraan sosial lebih bersifat *carity* karena dirancang dalam kondisi darurat ekonomi masyarakat akibat kemiskinan, bencana alam, atau konflik. Dalam sejarah analisis dan implementasi kebijakan, kebijakan dengan paradigma *social welfare policy* banyak dirancang di negara-negara yang tergolong miskin dan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Biasanya, *social welfare policy* menjadi agenda agen-agen internasional, seperti badan-badan PBB dan masyarakat sipil internasional. Kebijakan publik bersifat lebih umum untuk seluruh urusan publik atau masyarakat secara umum. Kebijakan pendidikan dasar termasuk dalam kelompok kebijakan publik mengingat pendidikan dasar menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, secara makro-mikro, kebijakan pendidikan dasar dirumuskan sebagai proses dan prosedur analisis kebutuhan, program dan evaluasi program kebijakan dasar. Kebijakan sosial lebih khusus dikenal pada negara-negara dengan ekonomi maju. Kebijakan sosial dirumuskan dominan dalam rangka mengawasi pemerataan distribusi ekonomi masyarakat terkait dengan berbagai tanggung jawab terhadap negara, seperti pajak dan iuran atas penguasaan aset. Kebijakan sosial tidak dirancang untuk distribusi sumber ekonomi oleh masyarakat, mengingat masyarakat sudah memiliki kemampuan cukup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri. Kebijakan otonomi/desentralisasi dikenal di Indonesia sejak munculnya UU No. 29/199 tentang Otonomi Daerah. (Soenarya 2000) dan (Suyanto 2006) menyebutkan, UU otonomi daerah berkonsekuensi terhadap kebijakan pendidikan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan vokasi menjadi kewenangan delegatif dan desentralitatif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hanya saja, karena setiap daerah otonomi memiliki disparitas yang tinggi, kecepatan dan percepatan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan dasar tidak merata. Daerah-daerah otonomi dengan PAD cukup tinggi, mengalami kecepatan pembangunan khususnya pendidikan dasar (Ghany 2018). Kondisi ini dapat dibuktikan melalui analisis kebijakan makro-mikro, yang dilakukan oleh internal pemerintah daerah otonomi, maupun expert dari lembaga akademik seperti PT.

Khusus dalam konteks otonomi daerah dengan analisis mikro, kajian oleh (Azza N et al. 2021) mencoba menganalisis kebijakan pendidikan nasional dalam implementasinya di daerah. Azza, dkk., menemukan fakta bahwa terjadi perbedaan, bahkan kesalahan penafsiran kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan dasar oleh pengampu kebijakan pendidikan dasar di daerah. Secara kontekstual temuan Azza, dkk. dibuktikan melalui kajian Iman, dkk., (2021), bahwa penafsiran tentang kompetensi minimum masih beragam antar daerah dan antar sekolah. Perbedaan penafsiran oleh pengampu kebijakan pendidikan dasar di daerah dan sekolah akan berpengaruh pada implementasi program pendidikan dasar, khususnya tahap pengujian. Gambaran tentang empat paradigma kebijakan, berikut konteks implementasinya akan mempengaruhi cara dan substansi pemahaman masing-masing pengampu kebijakan pendidikan dasar. Pemahaman yang beragam dan tidak komprehensif akan berpengaruh pada kesalahan menentukan kebijakan pelaku, konteks, jenis, dan langkah implementasi kebijakan. Untuk mengatasi akibat lebih buruk dari kekeliruan ini, tidak jarang dilakukan agenda-agenda penguatan *capacity building* pengampu kebijakan (ada masing-masing level). *Training, workshop*, magang, studi banding, dan sejenisnya merupakan agenda-agenda lazim untuk mengurangi efek negatif kesalahpahaman maksud kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan dalam Realitas Relasi Masyarakat-Pemerintah (Referensi Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)

Realitas relasi yang dimaksud pada kebijakan dalam realitas relasi yakni pola hubungan antara pengampu kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat atas kebijakan. Pola hubungan ini sangat ditentukan oleh tingkat ekonomi masyarakat, yang mempengaruhi acuan perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, cenderung mengakomodasi paradigma *social welfare policy*. Masyarakat dengan ekonomi baik, cenderung mengakomodasi *social policy*. Kasus Indonesia, dengan disparitas ekonomi cukup beragam, mengakomodasi paradigma *public policy* dan desentralisasi/otonomi. (Tilaar 2008) menyebutkan, paradigma *social welfare policy* berdampak pada kebijakan yang *top down*. Akibatnya, masyarakat berposisi sebagai penerima manfaat, dan pola relasinya menjadi hubungan atas-bawah, mengatur-dituri, memberi-menerima. Kondisi ini lazim mengingat masyarakat dengan ekonomi rendah akibat kemiskinan berkepanjangan karena perang, bencana alam, atau wabah penyakit seakan tidak berdaya, dan selalu menerima kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pendidikan. Namun demikian, terjadi semacam keunikan dalam konteks Indonesia dengan ekonomi masyarakat yang beragam, dengan kebijakan otonomi daerah dan mengakomodasi paradigma kebijakan publik pola hubungan *top-down* masih terasa dan kental. Walaupun sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur sistem perwakilan melalui parlemen, praktik dan pola hubungan masyarakat dan pemerintah sangat signifikan. Dalam konteks nyata, tidak jarang para legislator

yang bertanggungjawab sebagai penyambung aspirasi masyarakat bersikap sebagai pemberi, dan masyarakat sebagai penerima dalam konteks otonomi daerah. Praktik distribusi bantuan sosial melalui pokok pikiran (POKIR) legislatif menjadi instrumen menjadikan masyarakat dalam posisi penerima bantuan.

Kondisi lain terjadi pada masyarakat dengan ekonomi baik dan maju dengan mengakomodasi paradigma *social policy*. Pemerintah dan masyarakat berada pada posisi setara, dengan perbedaan fungsi. Masyarakat memiliki kebebasan menentukan kebutuhannya, karena memiliki kemampuan, sementara pemerintah menjadi regulator, fasilitator, dan dinamisator. (Biddle 1987) menyebutkan, masyarakat dengan ekonomi maju lebih egaliter menentukan arah ekonominya sesuai sistem ekonomi di tingkat negara. Negara bertanggungjawab menentukan kebijakan umum, sedangkan konteks mikro dalam praktik ekonomi menjadi ranah masyarakat. Tidak jarang konteks ekonomi berpengaruh pada bidang lain, termasuk pendidikan. Karena itu, kebijakan pendidikan dasar menjadi konteks *social policy*, bahwa masyarakat berhak menentukan arah dan tujuan pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah merumuskan kebijakan umum, sedangkan teknis dan kontekstual menjadi tanggung jawab masyarakat dan sekolah. perbedaan relasi dalam konteks analisis dan implementasi kebijakan, khususnya pendidikan dasar tidak jarang berpengaruh besar terhadap pemahaman, penentuan aktor, arena, jenis dan langkah implementasi kebijakan pendidikan dasar. Hanya saja, kultur ketatanegaraan dan sistem politik, sebagaimana kasus Indonesia menjadikan pola relasi dengan pemerintah sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima menjadi pemandangan keseharian konteks analisis dan analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar.

Definisi Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Perspektif Pemahaman, Paradigma dan Realitas Relasi)

Implementasi kebijakan didefinisikan dalam dua hal, yakni konseptual dan metodologis. Secara konseptual, implementasi kebijakan pendidikan dasar berkaitan dengan hal-hal konseptual tentang perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi (POAC = Planning, Organizing, Actuating, and Evaluating) pendidikan dasar (Alhan and Putri 2023; Nurwan 2019; Robiatul, Marini, and Sumantri 2021; Solichin 2015; Syani, Mufid, and Mufarrihul 2018; Tawa 2019; Yuliah 2020). Termasuk dalam POAC ini adalah penentuan indikator, strategi, dan instrumen implementasi kebijakan. Definisi implementasi kebijakan pada tahap konseptual ini masih berbentuk deskriptif dan bersifat administratif karena belum berupa konteks nyata analisis implementasi kebijakan. Proses administratif definisi konseptual ini banyak dilengkapi dengan analisis lingkungan strategis dengan berbagai metode, seperti SWOT, TOWS, Participatory action research (PAR) atau Participatory Rural Appraisal (PRA), dan lainnya (Solichin 2015). Tidak jarang juga secara konseptual kegiatan berbentuk rapat-rapat koordinasi, bahkan lobi-lobi *stakeholders*. Secara metodologis, tahapan POAC sudah berbentuk strategis teknis yang implementatif dalam proses analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar. pada fase metodologis, implementasi kebijakan pendidikan dasar sudah menghasilkan produk berbentuk indikator strategi kebijakan, metode kebijakan, pola pelaksanaan kebijakan, dan analisis efektivitas, dan dampak kebijakan (Ridlwani and Asya'ri 2021).

Definisi kebijakan pendidikan dasar sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak jarang berhadapan dengan keterbatasan pemahaman pengampu kebijakan sebagai perumus kebijakan tentang definisi implementasi itu sendiri, berikut keterbatasan pemahaman tentang paradigma dan realitas relasi pemerintah dan masyarakat. Pengampu kebijakan tidak mengenal paradigma kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan masyarakat dan pemerintah berdasarkan status ekonomi secara lokal dan regional. Kecenderungan ini disebabkan karena kultur birokrasi yang cenderung status quo dengan menganggap masyarakat sebagai kelompok yang menerima manfaat kebijakan pemerintah. Sebab lain dari kecenderungan dana kultur birokrasi seperti ini karena faktor budaya eselonisasi, yang tidak memanfaatkan konsep meritokrasi. Secara tidak sadar, birokrasi hari ini menjelma menjadi tirani baru dengan balutan isu demokrasi dan transparansi (Akbar, Rulandari, and Widaningsih 2021). Sebab lain lagi, yakni intervensi politik oleh legislatif dalam penentuan pejabat publik. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan. Program tidak rugi. Yang menjadi korban adalah anak didik dan generasi masa depan kita (Nasution 2018). Pejabat publik bidang pendidikan di daerah kurang mumpuni. Kebijakannya pun tidak efektif, karena salah analisis, salah strategi, dan salah teknis. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat, seperti sekolah, masyarakat, dan peserta didik tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan. Instrumen dan struktur partisipasi masyarakat tersedia dalam bentuk komite dan guyub-guyub orang tua siswa, tetapi hanya menjadi pajangan.

Bentuk lain secara teknis akibat kesalahan kebijakan dalam implementasi pendidikan dasar adalah ketidakjelasan pilihan kurikulum pendidikan SD ketika terjadi kebijakan nasional tentang kurikulum. Ketika pemerintah pusat (Jakarta) menetapkan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), pemerintah tidak serta merta merumuskan kebijakan pendukung di daerah sebagai payung pelaksanaannya di sekolah dasar. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait justru memberikan ruang perdebatan yang membingungkan pelaksana kurikulum di sekolah. Konteks yang terjadi adalah, sebagai mengembangkan KBK,

sebagian lain masih dengan Kurikulum PPSP. Kondisi demikian terjadi terus menerus dalam setiap fase perubahan kebijakan kurikulum secara nasional. Ketika KBK beralih ke KTSP sebagai konsekuensi otonomi daerah dan otonomi sekolah, beberapa di antaranya masih mengembangkan KBK. Ketika KTSP bergeser ke K13, kondisi masih sama. Demikian juga dewasa ini dengan IKM, beberapa di antaranya masih mengakui belajar dengan acuan K13 (Daga 2020; Rahman Bp et al. 2022). Pada sisi lain, pengampu kebijakan tidak mengambil langkah dan kebijakan yang jelas tentang konteks yang berkembang. Namun, karena pihak pengampu dan penerima manfaat sudah membangun kultur sebagai pemberi dan penerima dalam konteks kebijakan publik, akhirnya kondisi ini dianggap sebagai kondisi alamiah, dan terus terjadi berulang. Akhirnya menjadi kebudayaan pada konteks secara keseluruhan. Pemerintah menganggap konteks demikian sebagai hal biasa, legislatif pun demikian, masyarakat pun tidak tahu harus bersikap seperti apa? Tetap saja yang dirugikan adalah generasi masa depan.

Aktor Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Perspektif Pemahaman, Paradigma, dan Realitas Relasi)

Terdapat pemahaman yang kurang pas dalam memahami siapa sesungguhnya aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar? Penulis cenderung menganggap bahwa seluruh aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar adalah stakeholders pendidikan dasar, atau semua pihak yang memiliki *interest* (kepentingan) atas terbentuk dan terselenggaranya kebijakan pendidikan dasar. Secara teoritis, (Madjid 2018) menyebutkan delapan aktor pelaksana implementasi kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan dasar, yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, *interest group*, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan tokoh perorangan. Legislatif menjadi strategis sebagai aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar, terutama di daerah provinsi dan kabupaten/kota karena tugas dan fungsi legislasi. Sebagai aktor, legislatif bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan rancangan kebijakan pendidikan dasar dalam bentuk rencana peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Secara prosedural, tugas ini diawali dengan inisiatif dan dengan dengar pendapat dengan eksekutif. Selanjutnya, eksekutif mengusulkan rancangan peraturan daerah, berikutnya legislatif membahas dalam sidang-sidang komisi dan paripurna. Mitra kerja legislatif, yakni eksekutif, yakni kelompok pemerintah pada level pemerintahan yang ada, selanjutnya dengan unit kerja masing-masing. Pola kerja yang dikembangkan, lazimnya eksekutif mengajukan rancangan peraturan daerah atau peraturan pemerintah kepada legislatif, selanjutnya disidangkan, berikut disetujui menjadi peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Administrator merupakan unit pemerintah pada bidang terkait. Dalam hal implementasi kebijakan pendidikan dasar, administrator yang dimaksud adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan atau kementerian pendidikan (pemerintah pusat) bertanggung jawab sebagai administrator penyelenggaraan kebijakan bidang Pendidikan (Solichin 2015). Dinas atau kementerian menjadi paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar (Alhan and Putri 2023). Partai politik menjadi kelompok lain dalam aktor implementasi kebijakan pendidikan dasar, yang berbeda dengan legislatif. Dalam konteks implementasi kebijakan, legislatif menjadi representasi rakyat sebagai wakil rakyat, sedangkan partai politik menjadi representasi konstituen. Walaupun sesungguhnya antara konstituen dan rakyat adalah sama, tetapi secara politik dibedakan dalam istilah karena perbedaan proses politik. Biasanya, partai politik menjadikan isu pendidikan dasar menjadi isu politik yang strategis dalam proses *get voters*. *Interest group* menjadi sangat spesifik dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan dasar, karena bagian dari kelompok kecil yang memiliki *concern* terhadap kebijakan pendidikan dasar (Ritonga 2018). Biasanya kelompok ini mewakili kelompoknya untuk satu agenda dalam keseluruhan kebijakan pendidikan dasar. Misal, kelompok pencinta lingkungan, berkepentingan untuk kurikulum kelestarian lingkungan dipelajari di sekolah dasar. Kelompok pencinta alam penting menawarkan dasar-dasar cinta lingkungan melalui program kecendekiaan sekolah dan masyarakat. Organisasi masyarakat (ORMAS) merupakan aktor unik dalam kebijakan pendidikan dasar di Indonesia. Keunikannya karena fenomena keormasan menjadi kekhasan struktur sosial Indonesia. Dikenal ada NU, Muhammadiyah, NWDI dan NW, dan lainnya, ada juga ormas dari kalangan agama Hindu, Nasrani, Budha, Khong Hu Cu, dengan nama-nama populer, dan dikenal melalui Yayasan dan lembaga pendidikan, seperti Saraswati, Kanisius, Antonius, dan lainnya. Peran dan fungsi ormas dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar sangat strategis karena ormas mewakili umat atau masyarakat yang menjadi basis masanya (Herdiansah 2016). Perguruan Tinggi lazim menjadi *expert* dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar. Dalam proses kemitraan, PT bertanggung jawab terhadap analisis akademis dokumen kebijakan yang akan, sedang, dan telah diimplementasikan. Terakhir, kelompok perorangan biasanya pribadi yang memiliki kecenderungan terhadap bidang tertentu sebagaimana pendidikan dasar. Kelompok ini tidak mewakili kepentingan mana pun, hanya lebih bersifat *voullenteer*.

Mengingat sub judul dikaitkan dengan pemahaman, paradigma dan realitas relasi dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar maka pembahasan tentang aktor terkait dengan pemahaman, paradigma, dan realitas relasi. Dalam konteks Indonesia dengan paradigma kebijakan publik atau pendidikan dasar sebagai kebutuhan dasar publik sejauh ini para aktor memahami kelompok *policy maker* adalah otoritas yang dominan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Tidak banyak aktor kebijakan memahami kebijakan

sebagai konsep dan metodologis. Mereka hanya tahu otoritas dalam hal kebijakan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan. Tidak banyak pengampu kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan dasar mengenal paradigma dalam implementasi kebijakan. Apa hubungannya pendidikan dasar dengan ekonomi dan lapangan kerja? Apa kaitan antara proses, hasil, dan kontinuitas belajar siswa pendidikan dasar dengan infrastruktur transportasi, dan lain-lain, yang mestinya menjadi *concern* para aktor implementasi kebijakan pendidikan dasar. Tidak sedikit kebijakan pendidikan dasar tidak efektif, karena masing-masing aktor kebijakan tidak memahami maksud itu. Keseluruhannya bermuara pada relasi yang selalu *top-down*, dan masyarakat selalu dianggap sebagai kelompok yang diberi, dan tidak bisa menentukan masa depan kebijakan pendidikan dasar.

Arena Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Perspektif Pemahaman, Paradigma, dan Realitas Relasi)

Arena atau lingkungan implementasi kebijakan pendidikan dasar merupakan lingkungan strategis yang menjadi argumentasi konseptual dan metodologis diimplementasikannya sebuah kebijakan, khususnya pendidikan dasar (Asyiah, Adnan, and Mubarak 2017; Lukitasari, Sulasmono, and Iriani 2017; Suhelayanti 2019). Arena atau lingkungan kebijakan dimaksud, dapat diidentifikasi dan dianalisis sebagai berikut: 1) tingkat pertumbuhan penduduk, yang pada periode tertentu akan menjadi APK usia pendidikan dasar. Jumlah APK ini penting untuk memetakan dan merumuskan kebijakan jumlah lembaga pendidikan yang disediakan, jumlah guru yang direkrut, jumlah fasilitas dan infrastruktur lain yang akan disediakan, dan seterusnya. 2) tingkat ekonomi masyarakat sebagai asal APK pendidikan dasar. informasi tingkat ekonomi strategis dalam menentukan sejumlah *resources* yang diinvestasikan dalam rumusan kebijakan pendidikan dasar. Tidak terbatas pada jumlah, tetapi dari keseluruhan jumlah yang dibutuhkan, masing-masing akan mengambil peranan dalam partisipasi stakeholders pendidikan. 3) lingkungan fisik, budaya, dan sosial masyarakat di lingkungan pendidikan dasar. Informasi tentang struktur tanah, resiliensi terhadap bencana, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, pola komunikasi dan sistem guyub masyarakat menjadi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar.

Contoh-contoh arena atau lingkungan implementasi kebijakan pendidikan dasar sangat ditentukan oleh pemahaman konseptual dan metodologis, paradigma kebijakan, dan pola relasi pemerintah masyarakat oleh pelaku kebijakan. Implementasi kebijakan tidak jarang dimaknai sebagai proses *business as usual*, yang hanya bertanggung memenuhi tanggung jawab rutin tanpa pemahaman komprehensif dan efektivitas penyelenggaraan kebijakan, seperti yang dipaparkan oleh (Suherman 2014) bahwa proses pengorganisasian pekerjaan di lingkungan sekolah sudah menjadi rutinitas. Sering kali juga ditemukan kasus memberikan layanan dan insentif kebijakan pendidikan dasar dalam bentuk dan pola seragam kepada masyarakat yang berbeda. Dengan alasan pemerataan dan keadilan, investasi kebijakan diberikan secara sama pada kelompok masyarakat berbeda. Selain karena kurang paham paradigma kebijakan, ada kecenderungan pengampu kebijakan pendidikan dasar melakukan praktek “cari aman” dengan praktik demikian, menghindari komplain, dan disharmoni dalam pengambilan kebijakan (Ilham 2021).

Jenis Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Perspektif Pemahaman, Paradigma, dan Realitas Relasi)

Lazimnya dikenal tiga jenis implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan dasar, yakni jenis linier, atraktif, dan jenis keterampilan proses (Rusdiana 2015). Jenis implementasi linier ditekankan pada kecermatan pengambilan keputusan ketika merumuskan kebijakan. Jenis ini beranggapan, pelaksanaan program kebijakan sangat ditentukan oleh kebenaran putusan yang diambil ketika kebijakan dirumuskan. Kesalahan keputusan awal akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program (Muslimin and Muqowin 2021). Jenis atraktif menawarkan proses dan prosedur implementasi yang lebih fleksibel, dan dapat dilakukan bolak balik secara atraktif. Hanya saja, jenis ini memerlukan kecermatan dalam pencatatan proses implementasi dalam rangka menentukan aspek mana saja dalam proses implementasi yang memerlukan perubahan dan perbaikan, tanpa harus melakukan perbaikan menyeluruh. Jenis keterampilan proses ditekankan pada proses dan prosedur teknis implementasi kebijakan. Jenis ini ditentukan melalui keterlibatan semua pihak secara partisipasi dalam implementasi kebijakan. Sekali lagi disampaikan, bahwa ketiga jenis ini merupakan pilihan-pilihan dalam implementasi kebijakan, dan sangat ditentukan oleh pemahaman atas implementasi kebijakan sebagai konsep dan metodologis, paradigma kebijakan, dan pola relasi masyarakat dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan dasar sebagai salah satu bentuk kebijakan publik.

Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Perspektif Pemahaman, Paradigma, dan Realitas Relasi)

Langkah implementasi kebijakan pendidikan dasar mengikuti langkah implementasi kebijakan publik lainnya, yakni interpretasi dan penafsiran kebijakan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Interpretasi diperlukan dalam rangka penyamaan persepsi dan sosialisasi kebijakan kepada masing-masing yang berkepentingan (Dewi, Marsidin, and Sabandi 2020; Kumala et al. 2021; Setiawan et al. 2022). Langkah ini penting dalam rangka membangun *sense of belonging* dan *sense of responsibility stakeholders* pendidikan dasar. Langkah berikutnya, yakni pengorganisasian, mencakup struktur organisasi pelaksana, SOP, sumber keuangan dan perlengkapan kebijakan, manajemen kerja kebijakan, program dan rincian program kebijakan dan jadwal pelaksanaan.

Terakhir, langkah aplikasi kebijakan, dalam bentuk penyediaan layanan. Setiap bentuk layanan kebijakan yang diberikan kepada publik pendidikan dasar, efektivitasnya diukur menurut output atau luaran langsung saat kebijakan diimplementasikan, dan outcome dalam mengukur dampak kebijakan dalam jangka panjang.

Simpulan

Melalui beberapa rasionalisasi dalam literatur, dilengkapi dengan informasi empiris, metode, dan analisis isi, disimpulkan sebagai berikut: 1) Implementasi kebijakan dasar dalam konteks Indonesia menjadi bagian kebijakan publik. Sebagai kebijakan publik, layanan pendidikan dasar menjadi otoritas pemerintah dan masyarakat dalam posisi penerima manfaat kebijakan; 2) Paradigma kebijakan pendidikan dasar di Indonesia terkesan ambigu sebagai kebijakan publik dan kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam sebutannya selalu disebut sebagai kebijakan publik dengan otoritas pemerintah diatur dalam berbagai bentuk batasan kewenangan. Namun, kenyataannya cenderung menjadi kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah memiliki otoritas dominan dalam implementasi kebijakan dasar; 3) Pemahaman, paradigma, dan pola relasi dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar tidak menjadi perhatian serius para pengampu kebijakan. Akibatnya, kebijakan terkesan menjadi dokumen rutin, tanpa memiliki pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar.

Referensi

- Akbar, Gugun Geusan, Novianita Rulandari, and Widaningsih. 2021. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(2):187–99. doi: 10.31334/transparansi.v4i2.1981.
- Alhan, Khusni, and Sari Nusantara Putri. 2023. "Implementasi Kebijakan Merdeka Mandiri Belajar: Studi Kasus Di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 4(1):29–44. doi: 10.54150/THAWALIB.V4I1.189.
- Arwildayanto, Sukung Arifin, and Sumar Tune Warni. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif*. Vol. 53.
- Asyiah, Siti, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak. 2017. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2(1):1–9. doi: 10.26740/JPSI.V2N1.P1-9.
- Azza N, Fatih, Farid Setiawan, Rio Saputra, Ammalayah Tri Yuliatin, and Muhamad Ilham. 2021. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 4(2):362–65. doi: 10.31004/jrpp.v4i2.3254.
- Biddle, B. J. 1987. "Social Research and Social Policy: The Theoretical Connection."
- Carl, Johannes, Anna S. Bryant, Lowri C. Edwards, Gillian Bartle, Jens E. Birch, Efstathios Christodoulides, Arunas Emeljanovas, Andreas Fröberg, Joseph Gandrieau, Barbara Gilic, Ivo van Hilvoorde, Peter Holler, Teodora M. Iconomescu, Johannes Jaunig, Ida Laudanska-Krzeminska, Suzanne Lundvall, Kristine De Martelaer, João Martins, Brigita Mieziene, Maria Mendoza-Muñoz, Alexandre Mouton, Bogdan S. Oлару, Marcos Onofre, Iuliia Pavlova, Marie Rose Repond, Vassiliki Riga, Kasper Salin, Christophe Schnitzler, Damir Sekulic, Clemens Töpfer, Jana Vasickova, Günay Yildizer, Viviana Zito, Peter Bentsen, Nigel Green, and Peter Elsborg. 2023. "Physical Literacy in Europe: The Current State of Implementation in Research, Practice, and Policy." *Journal of Exercise Science and Fitness* 21(1):165–76. doi: 10.1016/j.jesf.2022.12.003.
- Daga, Agustinus Tanggu. 2020. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar)." *Jurnal Edukasi Sumba (JES)* 4(2):103–10. doi: 10.53395/JES.V4I2.179.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Startegis: Konsep. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2010. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dewi, Mera Putri, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Sabandi. 2020. "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Kompetensi Lulusan Di Sekolah Dasar." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 2(2):144–52. doi: 10.31004/EDUKATIF.V2I2.117.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghany, Hafizah. 2018. "Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Sekolah Dasar." *Madaniyah* 8(2):186–98.
- Herdiansah, Ari Ganjar. 2016. "PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 1(1):49–67. doi: 10.24198/JSG.V1I1.11185.

- Ilham. 2021. "Kebijakan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 2(3):154–61.
- Jalal, Fasli, and Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa.
- Khaikleng, Piyapong, Suwimon Wongwanich, and Siridej Sujiva. 2014. "Development of a Program Theory for Evaluating the Success of Education Reform Policy Implementation in Schools by Using Inductive and Deductive Approaches." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 116:1389–93. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.403.
- Kumala, Nuraini Dewi, Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, and Tramidzi. 2021. "Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 6(2):12–19. doi: 10.47435/JPDK.V6I2.625.
- Lukitasari, Sasadara Wahyu, Bambang Suteng Sulasmono, and Ade Iriani. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4(2):121–34. doi: 10.24246/J.JK.2017.V4.I2.P121-134.
- Madjid, Abd. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian, Kebijakan, Dan Perencanaan*. Rake Sarasin Yogyakarta.
- Muslimin, Luk, Luk Yata Lalak, and Muqowin. 2021. "Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 7(3):708–18. doi: 10.33394/JK.V7I3.3468.
- Nasution, Efrizal. 2018. "Problematika Pendidikan Di Indonesia." *JURNAL MEDIASI* 8(1).
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Pustaka Pelajar.
- Nurwan, Tryas Wardani. 2019. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 3(2):201–12. doi: 10.24036/JESS/VOL3-ISS2/176.
- Primasari, Ika Firma Ningsih Dian, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. 2021. "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(3):1479–91.
- Rahman Bp, Abdul, Yusdayanti, Muhammad Nawir, and Hidayah Quraisy. 2022. "FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN." *PILAR* 13(1):46–53.
- Ridlwani, M., and Asya'ri. 2021. "Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Negara (Singapur, Jepang, Korea Selatan) Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia." *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 7(2):141–48.
- Ritonga, Maimuna. 2018. "Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik : Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5(2):2579–4647.
- Robiatul, Munajah, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. 2021. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(3):1183–90. doi: 10.31004/BASICEDU.V5I3.886.
- Romadhon, Muhamad, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. 2021. "Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi Di Sekolah Dasar." *Jurnal Elementaria Edukasia* 4(1):109–15. doi: 10.31949/JEE.V4I1.3085.
- Rusdiana, A. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Safitri, Ida, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Subandi. 2020. "Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 2(2):176–80. doi: 10.31004/EDUKATIF.V2I2.123.
- Sa'ud, Udin Syaefudin. 2006. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, F., S. M. Urbaningkrum, U. Rahmawati, M. Afifah, and F. N. Rohmah. 2022. "Analisis Urgensi Proses Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal-Unsultra.Ac.Id* 2(2):67–77.
- Soenarya, Endang. 2000. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Adicita Karya Nusa.
- Solichin, Mujianto. 2015. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Religi: Jurnal Studi Islam*.
- Suhartono, Oki. 2021. "Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(1). doi: 10.18860/ROSIKHUN.V1I1.13897.
- Suhelayanti. 2019. "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1(1):11–26. doi: 10.32505/LENTERA.V1I1.1662.
- Suherman. 2014. "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 11(2):68–80. doi: 10.17509/JAP.V21I2.6676.
- Suryadi, Ace, and H. A. R. Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Suyanto, and Djihad Hisyam. 2006. *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*. Adicita Karya Nusa.
- Syani, Ahmad Khoirul, Shohibul Mufid, and Hazin Mufarrihul. 2018. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih." *Khazanah Pendidikan* 11(1). doi: 10.30595/JKP.V11I1.2309.

-
- Tawa, Angelika Bule. 2019. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKOLA DASAR." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4(2):107–17.
- Tilaar, H. A. R. 2008. "Menggugat Manajemen Pendidikan Nasional."
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30(2):129–53. doi: 10.52030/ATTADBIR.V30I2.58.